

## ABSTRAK

Diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang menjelaskan komponen pokok dalam penyusunan anggaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah. Berdasarkan dokumen publik ini, maka seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat menyusun rencana kerja dan anggaran yang tertib, efisien, ekonomis, transparan, partisipatif, inovatif, akuntabel, dan aman untuk semua pihak yang terkait. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Penelitian ini membahas tentang proses penyusunan anggaran pada UPTD Terminal Bus/Minibus Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif studi kasus deskriptif. Analisis dan interpretasi akan dilakukan untuk memperoleh pemahaman dalam mengevaluasi penerapan terhadap perencanaan penyusunan anggaran. Data yang digunakan adalah data kualitatif berupa data terkait dengan sejarah perusahaan dan landasan teori (literatur) yang mendukung penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu observasi, wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan mengenai anggaran.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran yaitu rencana strategis, standar pelayanan minimal, peraturan pemerintah, anggaran tahun sebelumnya, kondisi sarana prasarana, serta keterbatasan dana. Proses penyusunan anggaran UPTD Terminal Bus/Minibus Kabupaten Nganjuk dimulai dari usulan kebutuhan yang kemudian dijustifikasi oleh Sub Bagian Program dan Evaluasi untuk dijadikan RKA-SKPD, selanjutnya diverifikasi di TAPD dan disahkan oleh DPRD untuk selanjutnya menjadi DPA-SKPD.

Kata kunci: Proses Penyusunan Anggaran, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Terminal

## ABSTRACT

Regulation of the Minister of Transportation No. 3 of 2014 on Guidelines for Preparing Work Plans and Budget in the Area of Ministry of Transportation which explain basic components in the preparation of the budget aims to improve the quality of public services by the government. Based on the public document, all the work unit in the Ministry of Transportation can sort work plan and budgetary discipline, efficient, economic, transparent, participative, innovative, accountable, and safe for all parties related. The budgeting stage becomes very important, because the budget is not effective and not performance-oriented will be able to thwart the plans that had been developed.

The study discusses the budget process in UPTD Terminal Bus/Minibus Kabupaten Nganjuk. This study uses a qualitative approach. The analysis and interpretation will be made to obtain understanding in the planning to evaluate budgeting. The data used is the qualitative data in the form of data associated with the company's history, basic theory (literature) supporting this research. Source data used are primary data that is observation, interview and secondary data obtained from various sources of literature regarding the budget.

From the result of this study concluded the factors into consideration in preparing the budget that is the strategic plan, minimum standards of service, government regulation, budget the previous year, the state of infrastructure infrastructure, and the limited funds. UPTD Terminal Bus/Minibus budgeting process starts from the proposed requirement, later justified by Sub Part of the Program and Evaluation to be RKA-SKPD, subsequently verified in TAPD and subsequently approved by Parliament to be DPA-SKPD.

Keywords: Budgeting Process, Transportation Communications and Information Department, Terminals